JESYA
JURNAL EKONOMI & EKONOMI SYARIAH
Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah Vol 9 No 2, Juni 2026
E-ISSN : 2599-3410 | P-ISSN : 2614-3259
DOI : https://doi.org/ 10.36778/jesya.v9i2.2689

Analisis Konseptual melalui Bibliometric-Systematic Literature Review: Keberhasilan Redenominasi Rupiah dan Implikasinya terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Surya Tegar Widjiantoro[1)]
Institut Agama Islam Imam Syafii (IMSYA) Indonesia
suryategarr@gmail.com
Ahda Segati[2)]
Institut Agama Islam Imam Syafii (IMSYA) Indonesia
ahda.segati7@gmail.com
Yusrizal[3)]
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan
yusrizal@uinsu.ac.id

Abstrak Rencana redenominasi rupiah dalam PMK Nomor 70 Tahun 2025 muncul di tengah tekanan nilai tukar, sementara kajian terdahulu masih terbatas pada studi parsial dan belum memetakan kondisi kritis keberhasilannya bagi Indonesia. Penelitian ini menggunakan *Bibliometric-Systematic Literature Review* (B-SLR) terhadap 27 artikel Scopus, dianalisis dengan VOSviewer melalui *keyword co-occurrence analysis* dan sintesis naratif tematik. Hasil penelitian mengidentifikasi empat kluster: *Redenomination Risk & Monetary Union Shock, Legal & Financial Contract Redenomination, Economic Impact, Growth & Policy, dan Policy Implementation & Public Perception*. Sintesis menunjukkan bahwa keberhasilan redenominasi bergantung pada kesiapan analitik-legislatif, sosialisasi tersegmentasi untuk mencegah *money illusion*, kesiapan ekosistem bisnis, dan manajemen biaya transisi. Kontribusi penelitian ini adalah menyusun kerangka konseptual keberhasilan redenominasi rupiah yang menghubungkan risiko kebijakan, perilaku publik, kesiapan institusional, dan pertumbuhan ekonomi. Keterbatasan penelitian terletak pada jumlah artikel yang terbatas dan penggunaan basis data Scopus, sehingga studi lanjutan perlu memperluas sumber data dan pengujian empiris.

Kata Kunci *Redenominasi, Pertumbuhan Ekonomi, Bibliometrik, Systematic Literature Review, Money Illusion, Kebijakan Moneter*

PENDAHULUAN

Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat memasuki tahun 2026 dalam kondisi yang belum sepenuhnya pulih dari tekanan panjang sejak tahun sebelumnya. Pada 2 April 2026, rupiah berada di level Rp17.002 per dolar AS, sementara kurs JISDOR Bank Indonesia tercatat Rp17.015 per dolar AS (Ramadhan, 2026). Tekanan tersebut berlanjut pada 15 April 2026, ketika rupiah sempat menyentuh Rp17.147 per dolar AS (Maharani, 2026). Bank Indonesia dalam Rapat Dewan Gubernur Februari 2026 juga menegaskan bahwa nilai tukar rupiah dinilai masih undervalued dibandingkan dengan kondisi

JESYA
JURNAL EKONOMI & EKONOMI SYARIAH
Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah Vol 9 No 2, Juni 2026
E-ISSN : 2599-3410 | P-ISSN : 2614-3259
DOI : https://doi.org/ 10.36778/jesya.v9i2.2689

fundamental ekonomi Indonesia, sekaligus mempertahankan BI-Rate pada level 4,75% sebagai upaya menjaga stabilitas nilai tukar di tengah ketidakpastian pasar keuangan global (BI, 2026). Data kurs Bank Indonesia juga menunjukkan bahwa rupiah masih bergerak pada kisaran Rp17.000-an per dolar AS sepanjang April 2026, sehingga isu stabilitas nilai tukar tetap menjadi konteks penting dalam pembahasan redenominasi rupiah.

Dalam konteks tersebut, redenominasi rupiah kembali menjadi isu strategis dalam kebijakan moneter Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara di Asia Tenggara, setelah Vietnam, yang memiliki jumlah digit angka nol paling banyak pada nominal mata uangnya (Clark, 2017). Kondisi ini sering dikaitkan dengan inefisiensi pencatatan transaksi, kompleksitas administrasi keuangan, serta persepsi psikologis bahwa nilai mata uang Indonesia rendah di mata publik dan pelaku pasar internasional. Redenominasi sendiri merupakan kebijakan penyederhanaan nilai nominal mata uang dengan menghapus sejumlah digit angka nol tanpa mengubah daya beli riilnya. Dengan demikian, redenominasi berbeda dari sanering karena tidak mengurangi nilai riil uang masyarakat, melainkan hanya mengubah satuan nominalnya.

Rencana redenominasi rupiah kembali menguat setelah pemerintah memasukkannya ke dalam agenda kebijakan jangka menengah. Rencana tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2025–2029, dengan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Harga Rupiah ditargetkan rampung pada 2027 melalui Program Legislasi Nasional Jangka Menengah 2025–2029 (Simbolon, 2025). Kementerian Keuangan mencatat bahwa PMK Nomor 70 Tahun 2025 ditetapkan pada 10 Oktober 2025 dan berlaku sejak 3 November 2025, sedangkan pemberitaan ekonomi nasional juga mengonfirmasi bahwa RUU redenominasi ditargetkan selesai pada 2027.

Secara kebijakan, redenominasi dipandang sebagai langkah untuk meningkatkan efisiensi transaksi, memperkuat kredibilitas rupiah, dan mendukung modernisasi sistem pembayaran nasional. Ketua Umum APINDO, Shinta Kamdani, menekankan bahwa redenominasi merupakan penyederhanaan nominal tanpa mengurangi nilai riil rupiah, dengan implementasi yang harus mempertimbangkan stabilitas politik, ekonomi, sosial, serta kesiapan teknis dalam aspek hukum, logistik, dan teknologi informasi (Humas Indonesia, 2025). Bank Indonesia melalui Kepala Departemen Komunikasi, Ramdan Denny Prakoso, juga menegaskan bahwa redenominasi merupakan langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi transaksi dan mendukung modernisasi sistem pembayaran nasional (Humas Indonesia, 2025). Pernyataan tersebut sejalan dengan arah kebijakan Bank Indonesia dalam Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025 dan 2030 yang menempatkan digitalisasi sistem pembayaran sebagai bagian dari transformasi ekonomi dan keuangan digital nasional.

Namun, rencana redenominasi rupiah menghadirkan paradoks kebijakan karena muncul ketika nilai tukar rupiah masih berada dalam tekanan. Redenominasi tidak dapat dipahami semata-mata sebagai kebijakan teknis penyederhanaan nominal, tetapi harus dikaitkan dengan stabilitas makroekonomi, kredibilitas otoritas moneter, kepercayaan publik, kesiapan sistem pembayaran, dan prospek pertumbuhan ekonomi. Pengalaman beberapa negara menunjukkan bahwa redenominasi dapat berhasil apabila dilakukan dalam kondisi inflasi terkendali, stabilitas politik terjaga, komunikasi kebijakan berjalan efektif, dan sistem administrasi siap. Sebaliknya, pengalaman Venezuela dan Zimbabwe menunjukkan bahwa redenominasi yang dilakukan di tengah ketidakstabilan ekonomi dan

JESYA
JURNAL EKONOMI & EKONOMI SYARIAH
Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah Vol 9 No 2, Juni 2026
E-ISSN : 2599-3410 | P-ISSN : 2614-3259
DOI : https://doi.org/ 10.36778/jesya.v9i2.2689

krisis kepercayaan justru dapat memperburuk persepsi masyarakat terhadap pemerintah dan mata uang nasional (Achmad, 2025).

Kajian internasional terbaru juga menunjukkan bahwa dampak redenominasi tidak bersifat tunggal. Marimuthu dan Maama (2021) dalam studi mengenai redenominasi Cedi di Ghana menemukan bahwa redenominasi dapat meningkatkan profitabilitas perusahaan, tetapi tidak secara otomatis meningkatkan nilai perusahaan. Temuan tersebut menunjukkan bahwa redenominasi dapat memberi dampak positif pada efisiensi mikroekonomi, namun efeknya terhadap nilai ekonomi yang lebih luas tetap bergantung pada stabilitas makroekonomi, ekspektasi pasar, dan kepercayaan pelaku usaha. Selain itu, Kremens (2024) menunjukkan bahwa risiko redenominasi dapat tercermin dalam persepsi pasar keuangan dan memengaruhi premi risiko, terutama ketika pelaku pasar menilai adanya ketidakpastian terhadap nilai mata uang dan kontrak keuangan. Dengan demikian, redenominasi bukan sekadar kebijakan administratif, tetapi juga berkaitan dengan kredibilitas moneter dan persepsi risiko pasar.

Di Indonesia, kekhawatiran terhadap kesiapan redenominasi juga semakin relevan karena ketahanan ekonomi dinilai masih menghadapi tekanan. Bright Institute memperingatkan bahwa ketahanan ekonomi Indonesia berada pada level yang relatif rapuh, ditandai oleh kondisi makroekonomi yang melemah, ruang fiskal yang terbatas, dan kebijakan moneter yang tidak sepenuhnya leluasa. Pelemahan rupiah diperkirakan masih dapat berlanjut pada 2026 dengan volatilitas yang lebih tinggi akibat peningkatan risiko keuangan global (alinea.id, 2025). Kondisi tersebut mempertegas bahwa keputusan redenominasi tidak dapat dilepaskan dari dinamika pertumbuhan ekonomi, stabilitas nilai tukar, dan kapasitas kebijakan fiskal-moneter.

Meskipun wacana redenominasi rupiah memiliki relevansi kebijakan yang tinggi, penelitian sebelumnya masih menyisakan beberapa kesenjangan akademis. Pertama, sebagian besar studi redenominasi masih berfokus pada studi kasus negara tertentu, seperti Ghana, Turki, Venezuela, Zimbabwe, atau negara-negara dengan pengalaman krisis moneter, sehingga belum banyak kajian yang memetakan struktur pengetahuan global mengenai redenominasi secara sistematis. Kedua, kajian mengenai Indonesia masih cenderung deskriptif dan normatif, terutama membahas definisi, urgensi, risiko, serta kesiapan kebijakan, tetapi belum banyak yang mensintesis bukti empiris lintas negara untuk mengidentifikasi faktor-faktor kritis keberhasilan redenominasi. Ketiga, hubungan antara redenominasi, stabilitas nilai tukar, kredibilitas moneter, sistem pembayaran digital, dan pertumbuhan ekonomi belum banyak dikaji melalui pendekatan gabungan bibliometrik dan Systematic Literature Review. Maharani et al. (2025), misalnya, telah melakukan systematic review mengenai redenominasi sebagai kebijakan moneter domestik, tetapi kajian tersebut belum secara khusus menempatkan keberhasilan redenominasi rupiah dalam hubungan konseptual dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui pemetaan bibliometrik global.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, problem statement penelitian ini adalah bahwa belum terdapat kajian yang secara sistematis memetakan perkembangan literatur global mengenai redenominasi mata uang sekaligus mensintesis faktor-faktor keberhasilan redenominasi yang relevan dengan stabilitas nilai tukar, kepercayaan publik, kesiapan institusional, modernisasi sistem pembayaran, dan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keberhasilan redenominasi rupiah dan implikasinya terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui pendekatan Bibliometric-Systematic Literature Review (B-SLR)**.** Pendekatan bibliometrik digunakan

JESYA
JURNAL EKONOMI & EKONOMI SYARIAH
Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah Vol 9 No 2, Juni 2026
E-ISSN : 2599-3410 | P-ISSN : 2614-3259
DOI : https://doi.org/ 10.36778/jesya.v9i2.2689

untuk memetakan tren publikasi, klaster tema, penulis, negara, dan perkembangan kajian redenominasi, sedangkan Systematic Literature Review digunakan untuk mensintesis bukti empiris mengenai prasyarat, risiko, serta implikasi kebijakan redenominasi bagi Indonesia.

LANDASAN TEORI

Konsep Permintaan dan Penawaran dalam Ekonomi Islam

Permintaan dan penawaran merupakan konsep dasar dalam ekonomi mikro yang menjelaskan bagaimana harga dan jumlah barang terbentuk melalui interaksi antara konsumen dan produsen. Dalam ekonomi konvensional, permintaan dipahami sebagai jumlah barang atau jasa yang ingin dan mampu dibeli konsumen pada berbagai tingkat harga, sedangkan penawaran menunjukkan jumlah barang atau jasa yang ingin dan mampu dijual produsen pada berbagai tingkat harga tertentu (Mankiw, 2021; Zainuddin & Nuryadin, 2024). Interaksi keduanya membentuk harga keseimbangan pasar yang berfungsi sebagai sinyal dalam alokasi sumber daya, produksi, dan konsumsi.

Dalam ekonomi Islam, mekanisme permintaan dan penawaran tetap diakui sebagai proses alamiah pembentukan harga. Islam tidak menolak mekanisme pasar selama berlangsung secara adil, transparan, dan tidak mengandung unsur kezaliman. Ibn Taimiyah menjelaskan bahwa naik turunnya harga tidak selalu disebabkan oleh ketidakadilan pelaku pasar, tetapi dapat terjadi secara alamiah akibat perubahan permintaan dan penawaran (Islahi, 1996; Rusdi & Widiastuti, 2020). Sejalan dengan itu, kajian terbaru menunjukkan bahwa ekonomi Islam menerima pembentukan harga melalui mekanisme pasar selama tidak terdapat manipulasi, penimbunan, monopoli, atau kecurangan informasi (Uzlan et al., 2023).

Perbedaan utama antara ekonomi Islam dan ekonomi konvensional terletak pada landasan nilai yang mengatur perilaku pasar. Dalam ekonomi konvensional, permintaan umumnya dijelaskan melalui rasionalitas konsumen dan maksimisasi utilitas, sedangkan penawaran dijelaskan melalui orientasi produsen untuk memaksimalkan keuntungan. Sebaliknya, ekonomi Islam menempatkan permintaan dan penawaran dalam kerangka halal-haram, maslahah, keadilan, amanah, dan tanggung jawab sosial (Chapra, 1992; Kahf, 2003; Zainuddin & Nuryadin, 2024). Dengan demikian, perilaku konsumen dalam ekonomi Islam tidak hanya diarahkan pada kepuasan individual, tetapi juga pada kepatuhan syariah dan kemaslahatan sosial.

Sintesis dari berbagai pemikiran menunjukkan bahwa ekonomi Islam tidak menggantikan teori permintaan dan penawaran, melainkan memperluasnya dengan memasukkan dimensi etika dan kelembagaan. Ibn Khaldun menekankan bahwa harga dipengaruhi oleh jumlah penduduk, kebutuhan masyarakat, biaya produksi, dan aktivitas perdagangan. Ibn Taimiyah menegaskan bahwa negara tidak perlu melakukan intervensi harga apabila perubahan harga terjadi secara wajar, tetapi intervensi dapat dibenarkan jika terjadi distorsi pasar seperti ihtikar, tadlis, monopoli, atau eksploitasi (Ibn Khaldun, 1967; Islahi, 1996; Rusdi & Widiastuti, 2020). Temuan ini sejalan dengan Febriyanti et al. (2026), yang menyatakan bahwa teori permintaan dan penawaran berbasis syariah tidak hanya menjelaskan hubungan harga dan kuantitas, tetapi juga menanamkan nilai moral dalam perilaku pasar.

Oleh karena itu, konsep permintaan dan penawaran dalam ekonomi Islam dapat dipahami sebagai mekanisme ekonomi sekaligus mekanisme etik. Pasar tetap diberi ruang untuk bekerja secara alamiah, tetapi hasil pasar harus dikawal agar tidak menimbulkan ketimpangan, eksploitasi, dan kerugian sosial. Dengan kata lain, ekonomi Islam menerima

JESYA
JURNAL EKONOMI & EKONOMI SYARIAH
Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah Vol 9 No 2, Juni 2026
E-ISSN : 2599-3410 | P-ISSN : 2614-3259
DOI : https://doi.org/ 10.36778/jesya.v9i2.2689

efisiensi pasar, tetapi menempatkannya di bawah prinsip keadilan, transparansi, keseimbangan, dan kemaslahatan.

Perbandingan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional

Tabel 1. Perbandingan Ekonomi Konvensional dan Ekonomi islam

Aspek	Ekonomi Konvensional	Ekonomi Islam
Dasar perilaku konsumen	Rasionalitas ekonomi dan maksimisasi utilitas (Mankiw, 2021)	Rasionalitas yang dibatasi prinsip halal, maslahah, kebutuhan riil, dan larangan israf (Chapra, 1992; Kahf, 2003)
Dasar perilaku produsen	Maksimisasi keuntungan dan efisiensi produksi	Keuntungan yang halal, amanah, kejujuran, kualitas barang, dan tanggung jawab sosial (Siddiqi, 2004; Zainuddin & Nuryadin, 2024)
Pembentukan harga	Ditetapkan melalui interaksi permintaan dan penawaran	Ditetapkan melalui permintaan dan penawaran yang adil, transparan, dan bebas manipulasi (Uzlan et al., 2023)
Peran negara	Terbatas, kecuali terjadi kegagalan pasar	Diperbolehkan ketika terjadi distorsi, penimbunan, monopoli, atau kezaliman pasar (Islahi, 1996; Rusdi & Widiastuti, 2020)
Orientasi utama	Efisiensi alokasi sumber daya dan keseimbangan pasar	Efisiensi, keadilan sosial, keseimbangan, dan falah (Chapra, 1992; Hafizd et al., 2025)
Pandangan terhadap konsumsi	Konsumsi sebagai pemenuhan preferensi individual	Konsumsi sebagai pemenuhan kebutuhan halal dan wajar, bukan perilaku berlebihan (Kahf, 2003; Febriyanti et al., 2026)
Pandangan terhadap keuntungan	Keuntungan sebagai insentif utama produksi	Keuntungan diperbolehkan selama diperoleh secara halal dan tidak merugikan pihak lain (Siddiqi, 2004)
Masalah utama	Rentan mengabaikan etika, distribusi, eksternalitas, dan ketimpangan	Membutuhkan kelembagaan, pengawasan, dan literasi syariah yang kuat
Larangan utama	Tidak secara normatif melarang riba, gharar, maysir, atau ihtikar	Melarang riba, gharar, maysir, ihtikar, tadlis, dan eksploitasi (Chapra, 1992; Siddiqi, 2004)
Tujuan akhir	Keseimbangan pasar dan efisiensi ekonomi	Keadilan, keseimbangan, kemaslahatan, dan falah

Secara kritis, ekonomi konvensional memiliki keunggulan dalam menjelaskan proses pembentukan harga, efisiensi alokasi sumber daya, dan respons pelaku pasar terhadap perubahan harga. Namun, pendekatan ini memiliki keterbatasan karena sering bertumpu pada asumsi rasionalitas individual, informasi pasar yang relatif sempurna, dan keyakinan bahwa mekanisme pasar dapat menghasilkan alokasi yang efisien. Dalam praktiknya, pasar dapat mengalami kegagalan akibat ketimpangan informasi, eksternalitas, kekuatan monopoli, spekulasi, serta distribusi pendapatan yang tidak merata (Stiglitz, 2002; Spangenberg & Hail, 2024). Kritik terbaru terhadap ekonomi neoklasik juga menyoroti bahwa pendekatan pasar yang terlalu menekankan efisiensi dapat mengabaikan aspek sosial, ekologis, dan keadilan distributif.

Ekonomi Islam menawarkan kerangka korektif dengan memasukkan nilai moral dan tujuan sosial ke dalam mekanisme pasar. Dalam perspektif Islam, pasar tidak hanya dipandang sebagai tempat bertemunya permintaan dan penawaran, tetapi juga sebagai institusi sosial yang harus menjaga kejujuran, transparansi, keadilan, dan kemaslahatan. Karena itu, harga yang terbentuk melalui pasar baru dapat dianggap sah apabila prosesnya bebas dari penipuan, manipulasi, penimbunan, riba, gharar, maysir, dan eksploitasi

Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah Vol 9 No 2, Juni 2026
E-ISSN : 2599-3410 | P-ISSN : 2614-3259
DOI : https://doi.org/ 10.36778/jesya.v9i2.2689

(Chapra, 1992; Siddiqi, 2004; Uzlan et al., 2023). Hafizd et al. (2025) juga menegaskan bahwa integrasi nilai ekonomi Islam, seperti larangan riba dan redistribusi kekayaan melalui zakat, dapat mendorong sistem ekonomi yang lebih etis, adil, dan berkelanjutan.

Dengan demikian, perbedaan ekonomi Islam dan ekonomi konvensional tidak terletak pada pengakuan terhadap mekanisme pasar, karena keduanya sama-sama mengakui peran permintaan dan penawaran. Perbedaannya terletak pada orientasi dan batasan normatifnya. Ekonomi konvensional cenderung menempatkan efisiensi sebagai tujuan utama, sedangkan ekonomi Islam menempatkan efisiensi dalam kerangka keadilan, tanggung jawab sosial, dan kemaslahatan. Oleh karena itu, ekonomi Islam dapat dipahami sebagai pendekatan yang melengkapi sekaligus mengkritisi kelemahan sistem konvensional, khususnya ketika pasar gagal menjamin keadilan distribusi dan perlindungan terhadap pihak yang lemah.

Berdasarkan uraian tersebut, konsep permintaan dan penawaran dalam ekonomi Islam bukan merupakan penolakan terhadap teori pasar konvensional, melainkan perluasan terhadap keterbatasannya. Ekonomi konvensional mampu menjelaskan bagaimana harga terbentuk, tetapi belum selalu menjawab apakah proses pembentukan harga tersebut adil, apakah informasi tersedia secara transparan, dan apakah hasil pasar menciptakan kesejahteraan sosial. Ekonomi Islam mengisi ruang tersebut dengan menempatkan moralitas, keadilan, dan kemaslahatan sebagai bagian integral dari aktivitas ekonomi (Chapra, 1992; Kahf, 2003; Zainuddin & Nuryadin, 2024).

Dengan demikian, permintaan dan penawaran dalam perspektif Islam harus dipahami sebagai mekanisme pasar yang terikat pada nilai. Konsumen tidak hanya mempertimbangkan harga dan utilitas, tetapi juga kehalalan, kebutuhan, dan dampak sosial konsumsi. Produsen tidak hanya mempertimbangkan biaya dan keuntungan, tetapi juga kejujuran, kualitas, tanggung jawab sosial, dan larangan memperoleh keuntungan melalui cara yang batil. Oleh sebab itu, pasar dalam ekonomi Islam diarahkan untuk mencapai keseimbangan antara efisiensi ekonomi dan keadilan sosial.

METODOLOGI PENELITIAN

Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan systematic literature review berbasis bibliometrik, atau Bibliometric-Systematic Literature Review (B-SLR). Pendekatan ini berbeda dari *narrative review* karena proses pencarian, seleksi, penyaringan, dan analisis literatur dilakukan secara sistematis, transparan, dan dapat direplikasi. B-SLR mengintegrasikan analisis bibliometrik kuantitatif dengan sintesis kualitatif sistematis untuk memetakan struktur pengetahuan sekaligus menghasilkan pemahaman konseptual terhadap suatu bidang kajian (Marzi et al., 2025).

Pendekatan ini dipilih karena topik redenominasi dan pertumbuhan ekonomi bersifat lintas disiplin, mencakup ekonomi moneter, ekonomi pembangunan, kebijakan publik, stabilitas nilai tukar, dan keuangan perilaku. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya bertujuan merangkum literatur yang ada, tetapi juga memetakan perkembangan tema, mengidentifikasi klaster penelitian, serta mensintesis faktor-faktor yang menentukan keberhasilan redenominasi dan implikasinya terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Dengan demikian, jenis studi literatur dalam penelitian ini adalah systematic literature review dengan dukungan analisis bibliometrik, bukan *narrative review*. Analisis bibliometrik digunakan untuk memetakan pola publikasi dan struktur tema, sedangkan

JESYA
JURNAL EKONOMI & EKONOMI SYARIAH
Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah Vol 9 No 2, Juni 2026
E-ISSN : 2599-3410 | P-ISSN : 2614-3259
DOI : https://doi.org/ 10.36778/jesya.v9i2.2689

sintesis sistematis digunakan untuk menafsirkan isi artikel secara mendalam melalui pendekatan analisis tematik.

Sumber Data dan Strategi Pencarian Literatur

Data penelitian diperoleh dari artikel ilmiah yang dipublikasikan pada basis data Scopus, Web of Science, dan Google Scholar melalui perangkat lunak Publish or Perish. Pemilihan ketiga sumber tersebut dilakukan untuk memperoleh cakupan literatur yang luas, baik dari jurnal internasional bereputasi maupun artikel akademik yang relevan dengan topik redenominasi.

Strategi pencarian dilakukan dengan menggunakan kombinasi kata kunci dan operator Boolean pada bagian judul, abstrak, dan kata kunci artikel. Kata kunci yang digunakan meliputi:

"currency redenomination" OR "redenomination" OR "monetary redenomination"
AND
"economic growth" OR "macroeconomic stability" OR "exchange rate stability" OR "inflation" OR "monetary policy"

Strategi pencarian ini dirancang untuk memastikan bahwa artikel yang diperoleh benar-benar berkaitan dengan redenominasi mata uang dan dampaknya terhadap variabel makroekonomi, terutama pertumbuhan ekonomi, stabilitas nilai tukar, inflasi, dan kredibilitas kebijakan moneter.

Kriteria Inklusi dan Eksklusi

Kriteria pemilihan literatur ditetapkan sebelum proses pencarian dilakukan agar seleksi artikel berjalan objektif dan transparan. Kriteria tersebut mencakup tahun publikasi, jenis dokumen, indeksasi, relevansi topik, akses teks lengkap, dan kualitas sumber.

Tabel 2. Kriteria Inklusi dan Eksklusi Literatur

Dimensi	Kriteria Inklusi	Kriteria Eksklusi
Tahun publikasi	Artikel yang diterbitkan pada periode 2000–2026	Artikel yang diterbitkan sebelum tahun 2000
Jenis dokumen	Artikel jurnal peer-reviewed dan artikel review	Buku, tesis, disertasi, prosiding, editorial, opini, dan laporan populer
Basis data	Artikel yang ditemukan melalui Scopus, Web of Science, atau Google Scholar	Artikel di luar basis data tersebut dan tidak dapat diverifikasi kualitas akademiknya
Indeksasi/kualitas sumber	Jurnal terindeks Scopus, Web of Science, Google Scholar, atau memiliki proses peer review yang jelas	Jurnal tanpa proses peer review yang dapat diverifikasi
Relevansi topik	Artikel yang membahas redenominasi mata uang dan mengaitkannya dengan aspek makroekonomi, pertumbuhan ekonomi, stabilitas nilai tukar, inflasi, kredibilitas moneter, atau kepercayaan publik	Artikel yang hanya menyebutkan redenominasi secara sepintas tanpa analisis substantif
Akses teks	Artikel dengan teks lengkap yang dapat diakses	Artikel yang tidak tersedia dalam bentuk teks lengkap
Bahasa	Artikel berbahasa Inggris atau Indonesia	Artikel dengan bahasa lain yang tidak dapat dianalisis secara memadai

JESYA
JURNAL EKONOMI & EKONOMI SYARIAH
Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah Vol 9 No 2, Juni 2026
E-ISSN : 2599-3410 | P-ISSN : 2614-3259
DOI : https://doi.org/ 10.36778/jesya.v9i2.2689

Prosedur Seleksi Literatur

Proses seleksi artikel dilakukan secara bertahap dengan mengacu pada prinsip PRISMA 2020, yang mencakup tahap identifikasi, penyaringan, kelayakan, dan inklusi akhir (Page et al., 2021). Pada tahap identifikasi, artikel dikumpulkan dari Scopus, Web of Science, dan Google Scholar berdasarkan kata kunci yang telah ditentukan. Selanjutnya, artikel yang terduplikasi dihapus menggunakan perangkat lunak Mendeley.

Pada tahap penyaringan, judul dan abstrak artikel dibaca untuk menilai kesesuaiannya dengan fokus penelitian. Artikel yang tidak membahas redenominasi secara substantif atau tidak memiliki hubungan dengan aspek makroekonomi dikeluarkan dari daftar. Pada tahap kelayakan, artikel yang lolos penyaringan awal diperiksa melalui pembacaan teks lengkap. Artikel yang memenuhi seluruh kriteria inklusi kemudian dimasukkan ke dalam analisis bibliometrik dan sintesis sistematis.

Dengan prosedur tersebut, penelitian ini menghindari istilah umum seperti "membaca dan menganalisis" tanpa tahapan yang jelas. Setiap artikel diperlakukan melalui proses seleksi yang terstruktur, mulai dari pencarian, eliminasi duplikat, screening judul-abstrak, full-text review, hingga penetapan artikel akhir.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis dalam penelitian ini terdiri atas dua tahap, yaitu analisis bibliometrik dan analisis tematik.

Pertama, analisis bibliometrik dilakukan menggunakan VOSviewer untuk memetakan struktur literatur redenominasi dan pertumbuhan ekonomi. Analisis ini mencakup tren publikasi tahunan, negara dan institusi paling produktif, jurnal yang paling berpengaruh, artikel dengan sitasi tertinggi, serta analisis *keyword co-occurrence* untuk mengidentifikasi klaster tematik. VOSviewer dipilih karena mampu memvisualisasikan hubungan antar-kata kunci, pola keterkaitan tema, dan struktur intelektual dalam suatu bidang penelitian (Van Eck & Waltman, 2010).

Kedua, artikel yang telah terpilih dianalisis menggunakan thematic analysis. Teknik ini digunakan untuk mengidentifikasi, mengelompokkan, dan menafsirkan tema-tema utama yang muncul dari literatur, seperti prasyarat keberhasilan redenominasi, risiko implementasi, stabilitas nilai tukar, inflasi, kepercayaan publik, kesiapan institusional, dan implikasi terhadap pertumbuhan ekonomi. Analisis tematik dilakukan melalui proses pengodean, pengelompokan tema, interpretasi hubungan antartema, dan penyusunan sintesis naratif (Braun & Clarke, 2006).

Dengan kombinasi tersebut, analisis bibliometrik menjawab pertanyaan mengenai bagaimana struktur dan perkembangan literatur redenominasi terbentuk, sedangkan analisis tematik menjawab pertanyaan mengenai apa saja faktor substantif yang menentukan keberhasilan redenominasi dan implikasinya terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Langkah-Langkah Penelitian

Langkah penelitian dilakukan secara berurutan sebagai berikut:

JESYA
JURNAL EKONOMI & EKONOMI SYARIAH
Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah Vol 9 No 2, Juni 2026
E-ISSN : 2599-3410 | P-ISSN : 2614-3259
DOI : https://doi.org/ 10.36778/jesya.v9i2.2689

Gambar 1. Diagram Alur Penelitian

Perumusan implikasi redenominasi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia Diagram alur tersebut menunjukkan bahwa penelitian dilakukan melalui prosedur yang sistematis, bukan sekadar membaca dan merangkum literatur. Setiap tahap memiliki fungsi metodologis yang jelas, mulai dari penentuan fokus, pencarian artikel, seleksi literatur, analisis bibliometrik, analisis tematik, hingga sintesis konseptual.

Sintesis dan Pengembangan Temuan

Sintesis dilakukan dengan menggabungkan hasil pemetaan bibliometrik dan temuan analisis tematik. Hasil analisis bibliometrik digunakan untuk mengidentifikasi perkembangan literatur, klaster tema, dan artikel yang memiliki pengaruh akademik tinggi. Sementara itu, hasil analisis tematik digunakan untuk memahami substansi temuan dalam setiap klaster.

Sintesis akhir diarahkan untuk membangun taksonomi konseptual mengenai faktor-faktor yang menentukan keberhasilan redenominasi, meliputi stabilitas makroekonomi, pengendalian inflasi, stabilitas nilai tukar, kredibilitas otoritas moneter, kepercayaan publik, komunikasi kebijakan, kesiapan sistem pembayaran, dan dukungan regulasi. Taksonomi tersebut kemudian digunakan untuk menganalisis implikasi redenominasi rupiah terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.

HASIL PENELITIAN

Hasil Pencarian dan Seleksi Artikel

Proses pencarian dan seleksi artikel dilakukan dengan mengikuti protokol PRISMA 2020. Pencarian dilakukan pada basis data Scopus melalui perangkat lunak Publish or Perish (PoP) dengan menggunakan kata kunci “redenomination” dan “currency redenomination” pada bidang *keywords*. Pada tahap identifikasi awal, diperoleh 65 artikel yang relevan dengan topik redenominasi.

Setelah proses penyaringan dilakukan berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi, artikel yang tidak relevan, duplikat, tidak tersedia dalam teks lengkap, atau hanya menyebutkan redenominasi secara sepintas dikeluarkan dari analisis. Hasil akhir seleksi menghasilkan 27 artikel yang digunakan dalam analisis bibliometrik dan sintesis tematik.

JESYA
JURNAL EKONOMI & EKONOMI SYARIAH
Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah Vol 9 No 2, Juni 2026
E-ISSN : 2599-3410 | P-ISSN : 2614-3259
DOI : https://doi.org/ 10.36778/jesya.v9i2.2689

Secara analitis, jumlah artikel final yang relatif terbatas menunjukkan bahwa kajian redenominasi masih merupakan bidang penelitian yang belum terlalu luas dibandingkan tema-tema moneter lain seperti inflasi, nilai tukar, atau stabilitas keuangan. Kondisi ini memperkuat posisi penelitian ini sebagai kajian yang relevan karena tidak hanya memetakan literatur yang sudah ada, tetapi juga mengidentifikasi ruang kosong penelitian, terutama dalam hubungan antara redenominasi, pertumbuhan ekonomi, persepsi publik, dan prinsip keseimbangan pasar yang berkeadilan.

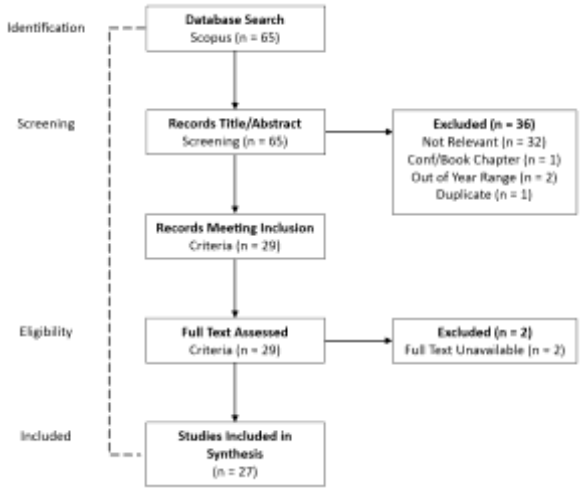

Gambar 2. Diagram PRISMA

Analisis Bibliometrik

Analisis bibliometrik dilakukan terhadap 27 artikel final untuk memetakan perkembangan, distribusi, dan karakteristik literatur redenominasi. Analisis menghasilkan peta tematik dalam tiga bentuk visualisasi, yaitu network visualization, density visualization, dan overlay visualization. Ketiga visualisasi ini tidak hanya menunjukkan distribusi istilah, tetapi juga memperlihatkan struktur intelektual dan arah perkembangan penelitian redenominasi.

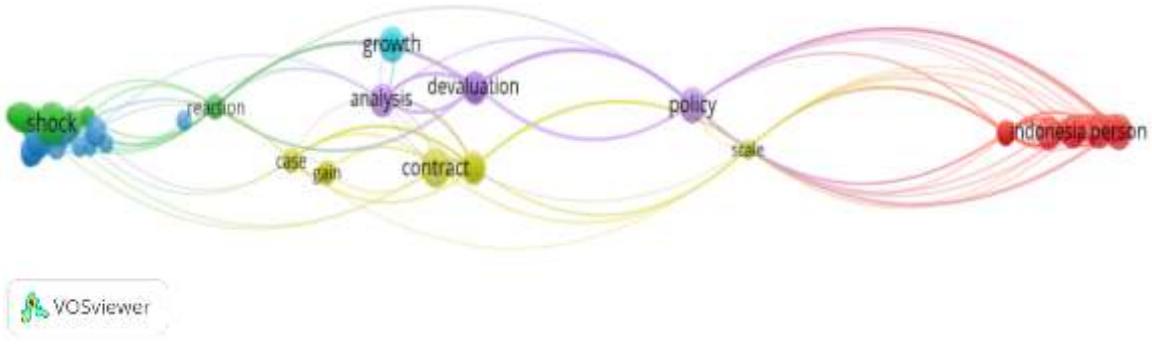

Gambar 3. Network Visualization

Network visualization menunjukkan bahwa literatur redenominasi terbagi ke dalam empat kluster tematik dengan 12 term utama yang memenuhi ambang batas minimum kemunculan. Setiap kluster merepresentasikan bidang perhatian yang berbeda, mulai dari risiko redenominasi, kontrak keuangan, dampak ekonomi, hingga persepsi publik.

JESYA
JURNAL EKONOMI & EKONOMI SYARIAH
Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah Vol 9 No 2, Juni 2026
E-ISSN : 2599-3410 | P-ISSN : 2614-3259
DOI : https://doi.org/ 10.36778/jesya.v9i2.2689

Tabel 3. Ringkasan Kluster

Kluster	Warna	Term	Label
1	Hijau	shock, reaction, euro area country, cdis	Redenomination Risk & Monetary Union Shock
2	Kuning	contract, case, gain, scale, liability	Legal & Financial Contract Redenomination
3	Biru/Ungu	growth, analysis, devaluation, policy	Economic Impact, Growth & Policy
4	Merah	Indonesia, person	Policy Implementation & Public Perception

Secara analitis, kluster pertama dan kedua menunjukkan bahwa literatur global masih banyak menempatkan redenominasi sebagai persoalan risiko hukum dan risiko keuangan. Redenominasi tidak hanya dipahami sebagai penghapusan digit angka nol, tetapi sebagai kebijakan yang dapat mengubah ekspektasi pasar, struktur kontrak, dan persepsi terhadap nilai mata uang. Hal ini sejalan dengan konsep *redenomination risk*, yaitu risiko yang muncul ketika perubahan denominasi berdampak pada aset, kewajiban, dan kontrak keuangan lintas yurisdiksi.

Kluster ketiga memberikan dasar penting bagi penelitian ini karena menghubungkan redenominasi dengan pertumbuhan ekonomi, devaluasi, dan kebijakan publik. Artinya, dampak redenominasi tidak dapat diukur hanya dari sisi efisiensi teknis, tetapi juga harus dikaitkan dengan stabilitas makroekonomi, kepercayaan publik, inflasi, dan kapasitas kebijakan pemerintah.

Sementara itu, kluster keempat menunjukkan bahwa Indonesia muncul sebagai konteks yang relatif spesifik dalam literatur redenominasi. Keberadaan term Indonesia dan person menunjukkan bahwa kajian Indonesia banyak berkaitan dengan persepsi masyarakat, perilaku individu, dan kesiapan publik. Ini penting karena keberhasilan redenominasi sangat bergantung pada pemahaman masyarakat agar kebijakan tersebut tidak disalahartikan sebagai sanering atau pemotongan nilai uang.

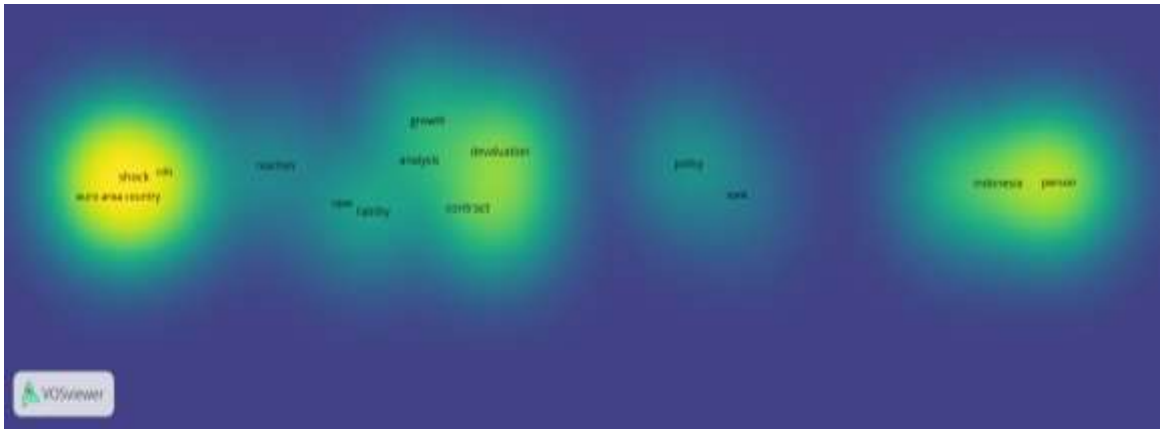

Gambar 4. Density Visualization

Density visualization menunjukkan intensitas perhatian penelitian pada area tematik tertentu. Warna kuning terang menunjukkan area dengan intensitas penelitian tinggi, warna hijau menunjukkan intensitas sedang, sedangkan warna biru menunjukkan intensitas rendah.

Hasil visualisasi menunjukkan dua pusat densitas utama. Pertama, area shock dan euro area country menunjukkan bahwa literatur internasional banyak membahas

JESYA
JURNAL EKONOMI & EKONOMI SYARIAH
Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah Vol 9 No 2, Juni 2026
E-ISSN : 2599-3410 | P-ISSN : 2614-3259
DOI : https://doi.org/ 10.36778/jesya.v9i2.2689

redenominasi dalam konteks risiko moneter dan guncangan kawasan mata uang. Namun, konteks ini berbeda dengan rencana redenominasi rupiah Indonesia. Dalam kasus Indonesia, redenominasi lebih diarahkan sebagai kebijakan penyederhanaan nominal dan modernisasi sistem pembayaran, bukan sebagai konsekuensi dari keluarnya suatu negara dari kawasan mata uang bersama.

Kedua, area Indonesia dan person menunjukkan bahwa literatur mengenai Indonesia cenderung menempatkan masyarakat sebagai aktor penting dalam keberhasilan kebijakan. Temuan ini memperlihatkan bahwa redenominasi rupiah tidak hanya memerlukan kesiapan teknis dari pemerintah dan Bank Indonesia, tetapi juga memerlukan kesiapan psikologis dan literasi publik. Tanpa pemahaman publik yang memadai, redenominasi dapat menimbulkan *money illusion*, yaitu persepsi keliru bahwa pengurangan digit nominal berarti pengurangan nilai riil.

Area tengah yang mencakup contract, growth, dan devaluation menunjukkan intensitas sedang. Hal ini mengindikasikan bahwa hubungan antara redenominasi dan pertumbuhan ekonomi belum menjadi pusat perhatian utama dalam literatur global. Padahal, aspek ini sangat penting bagi Indonesia karena redenominasi direncanakan dalam situasi nilai tukar yang masih menghadapi tekanan dan pertumbuhan ekonomi yang membutuhkan stabilitas kebijakan.

Sementara itu, term policy dan scale berada pada area dengan intensitas yang lebih rendah. Temuan ini menunjukkan adanya celah penelitian mengenai bagaimana skala implementasi, desain kebijakan, dan kesiapan institusional memengaruhi keberhasilan redenominasi. Dengan demikian, hasil density visualization memperkuat argumen bahwa penelitian ini perlu mengembangkan model konseptual yang menghubungkan redenominasi dengan stabilitas, kepercayaan publik, dan pertumbuhan ekonomi.

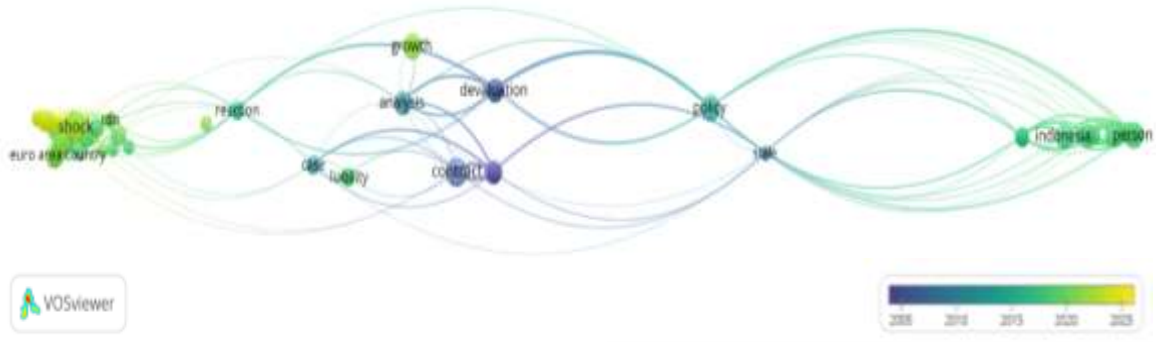

Gambar 5. Overlay Visualization

Overlay visualization menunjukkan evolusi temporal topik dalam literatur redenominasi berdasarkan rata-rata tahun publikasi setiap term. Warna biru tua menunjukkan tema yang berkembang pada periode awal, warna hijau menunjukkan periode menengah, sedangkan warna kuning terang menunjukkan tema yang lebih baru.

Pola temporal memperlihatkan bahwa penelitian redenominasi mengalami pergeseran fokus. Pada periode awal, kajian lebih banyak membahas aspek kontrak, kewajiban, dan skala perubahan denominasi. Pada periode berikutnya, perhatian bergeser ke isu dampak ekonomi, pertumbuhan, devaluasi, dan kebijakan. Pada periode terbaru, perhatian literatur semakin mengarah pada risiko moneter, stabilitas keuangan, dan reaksi pasar.

JESYA
JURNAL EKONOMI & EKONOMI SYARIAH
Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah Vol 9 No 2, Juni 2026
E-ISSN : 2599-3410 | P-ISSN : 2614-3259
DOI : https://doi.org/ 10.36778/jesya.v9i2.2689

Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa redenominasi tidak lagi cukup dipahami sebagai kebijakan administratif. Redenominasi telah berkembang menjadi isu multidimensi yang berkaitan dengan hukum kontrak, stabilitas keuangan, ekspektasi pasar, perilaku masyarakat, serta legitimasi kebijakan publik. Dalam konteks Indonesia, hal ini berarti bahwa kebijakan redenominasi harus dirancang tidak hanya dari sisi teknis percetakan uang dan penyesuaian sistem pembayaran, tetapi juga dari sisi komunikasi publik, regulasi kontrak, perlindungan konsumen, dan stabilitas makroekonomi.

Model Konseptual Keseimbangan Pasar Syariah dalam Redenominasi dan Pasar Digital

Berdasarkan hasil analisis, penelitian ini mengembangkan model konseptual yang menjelaskan hubungan antara stabilitas makroekonomi, kebijakan redenominasi, prinsip syariah, dan keseimbangan pasar dalam konteks digital.

Gambar 6. Model Konseptual Keseimbangan Pasar Syariah dalam Konteks Redenominasi

Model tersebut menunjukkan bahwa keseimbangan pasar syariah tidak hanya terbentuk melalui permintaan dan penawaran, tetapi juga melalui stabilitas makroekonomi, kredibilitas kebijakan, transparansi informasi, keadilan harga, dan kesiapan infrastruktur digital. Redenominasi dapat meningkatkan efisiensi transaksi jika seluruh faktor tersebut berjalan simultan. Namun, jika komunikasi publik lemah atau sistem digital belum siap, redenominasi berisiko menimbulkan distorsi harga, kebingungan masyarakat, dan penurunan kepercayaan terhadap mata uang.

Sintesis Systematic Literature Review (SLR)

Kluster 1: Redenomination Risk & Monetary Union Shock

Kluster ini berfokus pada risiko kegagalan kebijakan redenominasi yang bersumber dari lemahnya fondasi dan ketidakstabilan dukungan legislatif. Satu-satunya studi dalam kluster ini mengkaji tujuh Rancangan Undang-Undang (RUU) redenominasi yang diajukan di Kongres Kolombia antara tahun 2000 hingga 2018 melalui pendekatan analisis dokumen dan kajian historis. Seluruh RUU tersebut memiliki tujuan yang identik, yaitu menghapus tiga digit nol dari peso Kolombia, dan dapat dikelompokkan ke dalam dua tipologi: redenominasi permanen (2002, 2004, 2005, 2016) dan redenominasi transisi (2000, 2010,

Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah Vol 9 No 2, Juni 2026
E-ISSN : 2599-3410 | P-ISSN : 2614-3259
DOI : https://doi.org/ 10.36778/jesya.v9i2.2689

2018). Temuan yang paling krusial adalah bahwa tanpa terkecuali seluruh RUU tersebut gagal, baik karena gugur akibat pergantian periode legislatur maupun karena kalah suara dalam pemungutan di parlemen. (Cifuentes & Nates, 2018)

Disisi lain, tidak satu pun dari ketujuh RUU tersebut pernah menyertakan analisis biaya-manfaat yang komprehensif dan dipresentasikan secara resmi. Pola ini mengungkap sebuah kelemahan struktural yang berulang yaitu redenominasi kerap didorong oleh pertimbangan politis atau simbolis tanpa dilandasi kalkulasi ekonomi yang memadai dan dapat dipertanggungjawabkan. Temuan ini memiliki relevansi langsung bagi Indonesia, di mana rencana redenominasi rupiah yang telah tertuang dalam PMK Nomor 70 Tahun 2025 dan ditargetkan melalui jalur legislasi pada tahun 2027 berpotensi mengalami hambatan serupa apabila tidak disertai kajian biaya-manfaat yang transparan dan terukur sebagai fondasi argumentasi kepada parlemen.

Kluster 2: Legal & Financial Contract Redenomination

Kluster ini merupakan kluster yang secara empiris paling kaya dalam kajian ini, memuat dua studi berbasis Ghana yang masing-masing menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Keduanya menganalisis dampak redenominasi cedi Ghana tahun 2007 dari sudut yang berbeda, namun bersama-sama menghasilkan gambaran yang utuh mengenai konsekuensi finansial dan perilaku dari kebijakan tersebut.

Studi kualitatif berbasis wawancara semi-terstruktur terhadap 40 konsumen dewasa di Accra mendokumentasikan empat manifestasi *money illusion* yang nyata pasca-redenominasi: (1) penurunan rasa harga diri finansial akibat nominal saldo yang jauh lebih kecil; (2) mengabaikan kenaikan harga dalam satuan kecil yang secara riil tidak kecil; (3) peningkatan pengeluaran konsumsi karena nominal tampak lebih murah; dan (4) peningkatan donasi atau tip karena uang "terasa sedikit" secara psikologis. Dampak kumulatif keempat perilaku ini termanifestasi dalam lonjakan inflasi Ghana dari 10,7% sebelum redenominasi menjadi 20% setelahnya. Ini menunjukkan bahwa tanpa mitigasi efek psikologis yang memadai, redenominasi yang secara teknis bersifat netral pun dapat menghasilkan tekanan inflasi yang sangat nyata. (Dzokoto et al., 2010)

Studi kuantitatif menggunakan panel data 26 perusahaan di Ghana Stock Exchange selama periode 2002–2012 dengan estimasi *Generalized Method of Moments* (GMM) melengkapi temuan di atas dengan perspektif korporat. Pada tahun pelaksanaan redenominasi, nilai perusahaan yang diukur menggunakan Tobin's Q meningkat, mencerminkan ekspektasi positif pasar terhadap kebijakan tersebut. Namun secara bersamaan, profitabilitas yang diukur menggunakan *Return on Assets* (ROA) justru turun signifikan akibat lonjakan biaya operasional dan administratif dalam masa transisi sistem. Memasuki tahun kedua hingga kelima pasca-redenominasi, profitabilitas tumbuh secara signifikan dan berkelanjutan, sementara nilai perusahaan tidak menunjukkan peningkatan signifikan, sebagian karena bertepatan dengan tekanan krisis keuangan global 2008. (Bawuah, 2025)

Kedua studi Ghana dalam kluster ini secara bersama-sama mengonfirmasi sebuah pola penting yakni redenominasi memiliki potensi manfaat jangka menengah yang nyata, baik bagi efisiensi bisnis maupun bagi ekosistem transaksi, namun mensyaratkan kesiapan mengelola dua risiko sekaligus yaitu risiko psikologis pada level konsumen dan risiko biaya transisi pada level korporat. Bagi Indonesia, Ghana menjadi studi kasus komparatif yang sangat relevan mengingat kesamaan struktural seperti besarnya sektor informal,

Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah Vol 9 No 2, Juni 2026
E-ISSN : 2599-3410 | P-ISSN : 2614-3259
DOI : https://doi.org/ 10.36778/jesya.v9i2.2689

luasnya geografis distribusi penduduk, dan relatif rendahnya penetrasi instrumen keuangan non-tunai di luar perkotaan.

Kluster 3: Economic Impact, Growth & Policy

Kluster ini memuat satu studi yang secara langsung mengkaji potensi dampak redenominasi terhadap perilaku ekonomi masyarakat Indonesia, khususnya melalui lensa *money illusion*. Studi survei deskriptif terhadap 600 responden di tiga kota Jawa Tengah (Semarang, Kudus, dan Banjarnegara) menggunakan analisis *Cramer's V-test* dan *effect size* untuk mengidentifikasi segmen populasi yang paling rentan terhadap distorsi perilaku konsumsi pasca-redenominasi. (Prabawani, 2018)

Temuan studi ini mengungkap bahwa potensi *money illusion* di Indonesia tidak bersifat homogen, melainkan bervariasi secara sistematis menurut karakteristik demografis dan psikografis. Distorsi pada pengeluaran pendidikan lebih menonjol pada kelompok berpendidikan rendah, distorsi pada pengeluaran sosial berkorelasi dengan lokasi domisili, sementara distorsi pada pengeluaran utilitas dan hiburan berkaitan dengan jenis pekerjaan, usia, dan jenis kelamin. Secara keseluruhan, petani, pensiunan, dan pekerja level bawah teridentifikasi sebagai kelompok paling rentan. Temuan ini penting karena menunjukkan bahwa risiko inflasi akibat *money illusion* di Indonesia bukan sekadar risiko agregat, melainkan risiko yang berpotensi memperburuk kesenjangan ekonomi apabila kelompok rentan tidak memperoleh perlindungan kebijakan yang memadai. Dikontekstualisasikan bersama temuan dari studi Ghana dalam Kluster 2 yang menunjukkan manifestasi *money illusion* yang serupa berujung pada lonjakan inflasi, studi ini memperkuat urgensi program sosialisasi yang tersegmentasi dan terdiferensiasi sebagai rencana redenominasi rupiah.

Kluster 4: Policy Implementation & Public Perception

Kluster ini secara eksklusif berfokus pada konteks Indonesia dan mewakili dimensi paling operasional dari seluruh literatur yang dianalisis yaitu tentang bagaimana redenominasi seharusnya diimplementasikan dan bagaimana masyarakat serta pelaku usaha meresponsnya. Dua studi dalam kluster ini menggunakan sampel dan metode yang berbeda namun menghasilkan temuan yang saling memperkuat dan mengarah pada kesimpulan yang sama.

Studi pertama, berbasis survei *door-to-door* terhadap 600 responden di tiga kota Jawa Tengah, menemukan bahwa pemahaman masyarakat umum Indonesia tentang redenominasi masih sangat rendah dengan skor rata-rata 3,6 dari skala 1–6. Lebih kritis, persepsi terhadap kualitas sosialisasi yang telah dilakukan pemerintah juga dinilai sangat buruk dengan skor 2,7, mengindikasikan bahwa upaya komunikasi kebijakan yang ada belum efektif menjangkau dan dipahami masyarakat. Tingkat pendidikan dan jenis pekerjaan terbukti menjadi prediktor terkuat pemahaman individu, sementara kedekatan geografis dengan pusat pemerintahan turut berkontribusi pada perbedaan pemahaman antara masyarakat perkotaan dan pedesaan. (Prabawani et al., 2018)

Studi kedua, menggunakan pendekatan *Partial Least Squares* (PLS) terhadap 161 pemilik dan manajer bisnis di empat kota Jawa Tengah, memperdalam temuan tersebut dari sisi pelaku usaha. Hasil estimasi menunjukkan bahwa pemahaman tentang redenominasi adalah variabel paling dominan dalam menentukan kesiapan bisnis, dengan koefisien jalur sebesar 0,588. Kesiapan bisnis yang terbentuk kemudian secara signifikan memengaruhi persepsi dampak makro (koefisien 0,639) dan dampak mikro (koefisien 0,583). Secara mengejutkan, kondisi ekonomi makro terbukti tidak berpengaruh signifikan terhadap

JESYA
JURNAL EKONOMI & EKONOMI SYARIAH
Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah Vol 9 No 2, Juni 2026
E-ISSN : 2599-3410 | P-ISSN : 2614-3259
DOI : https://doi.org/ 10.36778/jesya.v9i2.2689

kesiapan bisnis, yang mengindikasikan bahwa faktor kognitif dan informasional jauh lebih menentukan daripada kondisi eksternal dalam membentuk kesiapan pelaku usaha. Para responden yang memiliki pemahaman memadai tentang redenominasi bahkan secara positif menilai kebijakan ini akan menyederhanakan pencatatan akuntansi dan meningkatkan produktivitas operasional mereka. (Prabawani, 2017)

Kedua studi dalam kluster ini secara konsisten menunjukkan bahwa sosialisasi bukan sekadar strategi komunikasi, melainkan variabel penentu yang bersifat kausal terhadap keberhasilan implementasi. Tanpa sosialisasi yang tersegmentasi, terstruktur, dan secara khusus dirancang untuk menjangkau kelompok rentan dan pelaku usaha kecil, risiko kebingungan massal yang berujung pada *bank run* dan tekanan inflasi akan sangat tinggi, persis sebagaimana yang terjadi di Ghana.

Sintesis Lintas Kluster: Kondisi-Kondisi Kritis Keberhasilan Redenominasi Rupiah

Sintesis lintas keempat kluster menghasilkan pola yang konsisten dan saling menguatkan yakni keberhasilan atau kegagalan redenominasi tidak ditentukan oleh kebijakan itu sendiri secara teknis, melainkan oleh terpenuhi atau tidaknya sejumlah kondisi kritis yang bersifat saling bergantung. Berdasarkan seluruh bukti empiris yang telah disintesis, terdapat empat kondisi kritis yang membentuk sebuah batasan keberhasilan redenominasi rupiah.

Pertama, kesiapan analitik dan legislatif: sebagaimana ditunjukkan oleh pengalaman Kolombia, wacana redenominasi yang tidak dilandasi kajian biaya-manfaat yang komprehensif dan dukungan legislatif yang solid akan terus berulang tanpa pernah terealisasi. Kedua, mitigasi risiko psikologis melalui sosialisasi tersegmentasi: bukti dari Indonesia dan Ghana secara konvergen menunjukkan bahwa *money illusion* adalah risiko sistematis yang hanya dapat dimitigasi melalui sosialisasi yang dirancang secara spesifik untuk setiap segmen demografis. Ketiga, kesiapan ekosistem bisnis: studi Indonesia menunjukkan bahwa pemahaman pelaku usaha adalah prediktor terkuat kesiapan implementasi, dan kesiapan ini dapat dibangun secara independen dari kondisi makroekonomi. Keempat, manajemen biaya transisi korporat: data Ghana Stock Exchange membuktikan bahwa meskipun redenominasi menjanjikan manfaat efisiensi jangka menengah, pemerintah harus menyiapkan mekanisme dukungan bagi pelaku usaha untuk menanggung biaya transisi jangka pendek yang tidak terhindarkan.

Keempat kondisi kritis ini bersifat kumulatif, kegagalan memenuhi salah satu di antaranya dapat menggagalkan keseluruhan kebijakan meskipun kondisi lainnya terpenuhi. Berdasarkan sintesis ini, dapat disimpulkan bahwa dampak redenominasi rupiah terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak bersifat deterministik positif maupun negatif, melainkan sangat bergantung pada sejauh mana pemerintah mampu memenuhi keempat kondisi kritis tersebut secara simultan, terkoordinasi, dan dengan urutan implementasi yang tepat.

Taksonomi Terstruktur: Kondisi Keberhasilan Redenominasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Tabel 4. Taksonomi Terstruktur

Kondisi Kritis	Indikator	Terpenuhi	Tidak Terpenuhi
Kluster 1:	Tidak ada tekanan *sovereign spread*; stabilitas politik terjaga;	Pasar keuangan merespons redenominasi sebagai	Redenominasi memicu *shock* pasar, *capital flight*, dan volatilitas

JESYA
JURNAL EKONOMI & EKONOMI SYARIAH
Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah Vol 9 No 2, Juni 2026
E-ISSN : 2599-3410 | P-ISSN : 2614-3259
DOI : https://doi.org/ 10.36778/jesya.v9i2.2689

Redenomination Risk & Monetary Union Shock	tidak ada ekspektasi *monetary union exit*	sinyal kredibilitas moneter yang kuat	nilai tukar yang memperburuk pertumbuhan
Kluster 2: *Legal & Financial Contract Redenomination*	Seluruh kontrak keuangan dalam dan luar negeri telah diidentifikasi; kerangka hukum konversi kontrak tersedia; RUU redenominasi disahkan	Transisi kontrak berjalan mulus tanpa sengketa hukum; kepastian investasi terjaga	Ketidakpastian hukum kontrak menghambat investasi dan meningkatkan biaya transaksi
Kluster 3: *Economic Impact, Growth & Policy*	Kajian biaya-manfaat komprehensif tersedia; kesiapan sistem akuntansi dan pembayaran korporat; mekanisme dukungan transisi ditetapkan	Efisiensi transaksi meningkat, produktivitas dan nilai perusahaan tumbuh dalam 2–5 tahun.	Biaya transisi membebani korporat, ROA turun pada tahun pertama; UMKM dan sektor informal paling terdampak
Kluster 4: *Policy Implementation & Public Perception*	Program sosialisasi tersegmentasi per demografi; literasi keuangan merata hingga pedesaan	*Money illusion* terkendali; tidak ada lonjakan inflasi konsumtif; kepercayaan publik terhadap rupiah meningkat	*Money illusion* memicu lonjakan inflasi; kepanikan publik berpotensi memicu *bank run*

Tabel 5. Matriks Skenario Dampak Redenominasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Skenario	Kluster 1	Kluster 2	Kluster 3	Kluster 4	Dampak Perekonomian
Optimal	√	√	√	√	**Pertumbuhan ekonomi meningkat**. Efisiensi transaksi, *Foreign Direct Investment* (FDI) meningkat, dan produktivitas bisnis tumbuh berkelanjutan.
Skenario A	x	√	√	√	**Pertumbuhan tidak stabil.** *Shock* moneter dan volatilitas nilai tukar menekan kepercayaan investor
Skenario B	√	x	√	√	**Pertumbuhan tertahan.** Ketidakpastian hukum kontrak menghambat investasi dan masuknya *Foreign Direct Investment* (FDI).
Skenario C	√	√	x	√	**Pertumbuhan moderat.** Manfaat jangka menengah tercapai namun tekanan korporat menahan akselerasi
Skenario D	√	√	√	x	**Pertumbuhan terganggu.** *Money illusion* memicu inflasi konsumtif yang menekan daya beli.
Buruk	x	x	x	x	**Pertumbuhan terdampak negatif.** Kombinasi *shock* moneter, kepanikan publik, dan krisis kepercayaan.

PEMBAHASAN

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa redenominasi tidak dapat dipahami sebagai kebijakan teknis yang netral secara otomatis. Meskipun secara konsep redenominasi hanya menyederhanakan nominal mata uang tanpa mengubah daya beli riil, keberhasilan implementasinya sangat bergantung pada kondisi sosial, hukum, kelembagaan, dan psikologis masyarakat. Dengan demikian, redenominasi bukan sekadar

JESYA
JURNAL EKONOMI & EKONOMI SYARIAH
Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah Vol 9 No 2, Juni 2026
E-ISSN : 2599-3410 | P-ISSN : 2614-3259
DOI : https://doi.org/ 10.36778/jesya.v9i2.2689

persoalan menghapus digit angka nol, melainkan kebijakan moneter yang membutuhkan kepercayaan publik, kepastian hukum, kesiapan pelaku usaha, dan komunikasi kebijakan yang efektif.

Jika dibandingkan dengan penelitian terdahulu, kegagalan redenominasi di Kolombia sebagaimana dijelaskan oleh Cifuentes dan Nates (2018) memperlihatkan bahwa kebijakan redenominasi dapat berhenti pada level wacana apabila tidak didukung oleh kajian biaya-manfaat dan legitimasi legislatif yang kuat. Temuan ini memberi pelajaran penting bagi Indonesia bahwa masuknya redenominasi ke dalam agenda kebijakan belum cukup menjadi jaminan keberhasilan. Rencana tersebut harus disertai argumentasi akademik, kalkulasi ekonomi, kerangka hukum, dan strategi komunikasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Sementara itu, pengalaman Ghana yang dikaji oleh Dzokoto et al. (2010) dan Bawuah (2025) menunjukkan dua sisi berbeda dari redenominasi. Di satu sisi, redenominasi berpotensi meningkatkan efisiensi transaksi dan memberikan manfaat bagi dunia usaha dalam jangka menengah. Namun, di sisi lain, kebijakan ini dapat menimbulkan distorsi perilaku akibat *money illusion* serta biaya transisi pada awal implementasi. Artinya, manfaat redenominasi tidak muncul secara instan, melainkan bergantung pada kemampuan pemerintah mengelola fase transisi, terutama dalam mencegah kesalahan persepsi masyarakat dan menekan beban adaptasi pelaku usaha.

Dalam konteks Indonesia, studi Prabawani (2017), Prabawani (2018), dan Prabawani et al. (2018) memperkuat argumen bahwa aspek pemahaman publik merupakan faktor yang sangat menentukan. Risiko *money illusion* tidak terjadi secara merata, tetapi lebih besar pada kelompok masyarakat dengan literasi keuangan rendah, kelompok berpendidikan rendah, pekerja level bawah, petani, pensiunan, dan masyarakat di luar pusat ekonomi. Oleh karena itu, sosialisasi redenominasi tidak dapat dilakukan secara umum dan seragam. Edukasi publik harus bersifat tersegmentasi, menggunakan bahasa sederhana, media yang sesuai, serta menjangkau kelompok yang paling rentan terhadap kesalahan persepsi.

Implikasi temuan ini terhadap praktik ekonomi modern semakin penting karena transaksi saat ini berlangsung dalam ekosistem digital. Redenominasi tidak hanya berdampak pada uang fisik, tetapi juga pada e-commerce, QRIS, mobile banking, sistem kasir, pembukuan digital, kontrak elektronik, dan aplikasi keuangan. Apabila sistem digital tidak siap, kesalahan konversi nominal dapat menimbulkan kebingungan konsumen, sengketa transaksi, dan peluang manipulasi harga. Karena itu, praktik seperti dual price display, audit sistem digital, standar konversi harga, dan pengawasan pembulatan harga menjadi instrumen penting untuk menjaga keadilan selama masa transisi.

Dari perspektif ekonomi syariah, temuan ini dapat dibaca sebagai kebutuhan untuk menyeimbangkan efisiensi dan keadilan. Redenominasi dapat sejalan dengan prinsip *maslahah* apabila mampu menyederhanakan transaksi, memudahkan pencatatan, dan memperkuat keteraturan sistem pembayaran. Namun, kebijakan ini juga berpotensi bertentangan dengan prinsip keadilan apabila membuka ruang bagi pembulatan harga yang tidak wajar, eksploitasi ketidaktahuan konsumen, atau kenaikan harga tersembunyi. Dengan demikian, pendekatan syariah memberi batas etik agar redenominasi tidak hanya efisien secara teknis, tetapi juga adil secara sosial.

Kelebihan konsep syariah dalam konteks ini terletak pada penekanannya terhadap amanah, transparansi, keadilan, dan larangan kezaliman dalam transaksi. Nilai-nilai tersebut relevan untuk mengawal redenominasi agar tidak merugikan masyarakat,

Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah Vol 9 No 2, Juni 2026
E-ISSN : 2599-3410 | P-ISSN : 2614-3259
DOI : https://doi.org/ 10.36778/jesya.v9i2.2689

khususnya kelompok yang lemah secara literasi dan ekonomi. Namun, keterbatasannya terletak pada kebutuhan operasionalisasi. Prinsip seperti *maslahah*, keadilan harga, dan anti-zalim perlu diterjemahkan ke dalam indikator kebijakan yang konkret, seperti mekanisme pengawasan harga, regulasi pembulatan nominal, perlindungan konsumen, dan standar transparansi pada platform digital.

Dengan demikian, pembahasan ini menegaskan bahwa dampak redenominasi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia bersifat kondisional. Redenominasi dapat mendukung pertumbuhan apabila dilaksanakan dalam kondisi makroekonomi yang stabil, didukung kerangka hukum yang kuat, disertai sosialisasi tersegmentasi, serta ditopang kesiapan ekosistem bisnis dan digital. Sebaliknya, jika dilaksanakan tanpa kesiapan tersebut, redenominasi berisiko menimbulkan kebingungan publik, tekanan inflasi, biaya transisi tinggi, dan penurunan kepercayaan terhadap mata uang. Oleh karena itu, keberhasilan redenominasi rupiah bukan ditentukan oleh kebijakan nominal itu sendiri, melainkan oleh kualitas tata kelola, komunikasi, dan perlindungan pasar selama proses implementasi.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan redenominasi rupiah tidak hanya ditentukan oleh penyederhanaan nominal mata uang, tetapi juga oleh kesiapan analitik-legislatif, sosialisasi tersegmentasi untuk mencegah *money illusion*, kesiapan ekosistem bisnis, serta pengelolaan biaya transisi. Analisis terhadap 27 artikel menunjukkan empat fokus utama literatur, yaitu risiko redenominasi, kontrak hukum-keuangan, dampak ekonomi-kebijakan, serta implementasi dan persepsi publik. Kontribusi ilmiah penelitian ini adalah menyusun kerangka konseptual keberhasilan redenominasi rupiah berbasis B-SLR yang menghubungkan aspek risiko, perilaku, kelembagaan, dan pertumbuhan ekonomi. Secara praktis, penelitian ini menegaskan perlunya kajian biaya-manfaat, kepastian hukum, edukasi publik, dukungan bagi pelaku usaha, dan kesiapan sistem pembayaran digital sebelum redenominasi diterapkan. Keterbatasan penelitian ini terletak pada jumlah artikel yang terbatas, sehingga studi selanjutnya perlu memperluas basis data dan menguji hubungan redenominasi dengan inflasi, kesiapan digital, serta pertumbuhan ekonomi secara empiris

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Institut Agama Islam Imam Syafii (IMSYA) Indonesia dan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Terima kasih juga kepada para reviewer atas masukan yang konstruktif dalam penyempurnaan artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

Achmad, A. (2025, November 9). *Redenominasi Rupiah 2026–2030: Antara rasionalisasi ekonomi dan ujian kepercayaan publik*. Teropong Senayan.

alinea.id. (2025, December 29). *Krisis ekonomi Indonesia bisa terjadi pada 2026 dan 2027*. Alinea.id.

Annazah, N. S., Juanda, B., & Mulatsih, S. (2018). Dampak redenominasi terhadap kinerja perekonomian: Pendekatan ekonomi eksperimental. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia, 18*(2), 167–190. https://doi.org/10.21002/jepi.2018.10

Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah Vol 9 No 2, Juni 2026
E-ISSN : 2599-3410 | P-ISSN : 2614-3259
DOI : https://doi.org/ 10.36778/jesya.v9i2.2689

Bawuah, B. (2025). The behavioral effects of economic agents on consumption and savings after currency reform: Evidence from Ghana's redenomination policy adaptation. *SN Business & Economics, 5*(2), Article 15. https://doi.org/10.1007/s43546-024-00784-6

BI. (2026, February 19). *BI-Rate tetap 4,75%: Mendorong pertumbuhan ekonomi, mempertahankan stabilitas*. Bank Indonesia.

Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology, 3*(2), 77–101. https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa

Chapra, M. U. (1992). *Islam and the economic challenge*. The Islamic Foundation.

Cifuentes, J. C. A., & Nates, D. E. (2018). Recent attempts to redenominate the Colombian peso: A historical overview. *Revista Finanzas y Política Económica, 10*(2), 389–402. https://doi.org/10.14718/revfinanzpolitecon.2018.10.2.8

Clark, J. (2017, October 24). *Time for Vietnam to lop zeros off its currency*. Asia Times.

Dzokoto, V. A. A., Mensah, E. C., Twum-Asante, M., & Opare-Henaku, A. (2010). Deceiving our minds: A qualitative exploration of the money illusion in post-redenomination Ghana. *Journal of Consumer Policy, 33*(4), 339–353. https://doi.org/10.1007/s10603-010-9144-3

Hafizd, J. Z., Janwari, Y., & Jubaedah, D. (2025). Comparative and integrative approach of conventional and Islamic economic theories in Islamic economic law development. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah, 10*(1), 20–39.

Humas Indonesia. (2025, November 13). *Rencana redenominasi rupiah perlu komunikasi publik yang jelas dan terukur*. Humas Indonesia.

Ibn Khaldun. (1967). *The Muqaddimah: An introduction to history*. Princeton University Press.

Islahi, A. A. (1996). *Economic concepts of Ibn Taimiyah*. The Islamic Foundation.

Kahf, M. (2003). Islamic economics: Notes on definition and methodology. *Review of Islamic Economics*.

Kremens, L. (2024). Currency redenomination risk. *Journal of Financial and Quantitative Analysis, 59*(6), 2838–2868. https://doi.org/10.1017/S002210902300087X

Lucas, R. E. (1988). On the mechanics of economic development. *Journal of Monetary Economics, 22*(1), 3–42. https://doi.org/10.1016/0304-3932(88)90168-7

Maharani, M., Labusang, M. S. D., Laronggo, A. L., Bakti, J. A., & Enggrina, D. (2025). Currency redenomination: Economic solution or nominal illusion? A systematic review. *Jambura Accounting Review, 6*(2). https://doi.org/10.37905/jar.v6i2.265

Maharani, S. (2026, April 16). *Rupiah menyentuh level Rp17.147 per dolar AS pada April 2026*. Readers.id.

Mankiw, N. G. (2021). *Principles of economics*. Cengage Learning.

Marimuthu, F., & Maama, H. (2021). Currency redenomination and firm value growth: Lessons from a developing economy. *Investment Management and Financial Innovations, 18*(1), 223–235. https://doi.org/10.21511/imfi.18(1).2021.19

Marzi, G., Balzano, M., Caputo, A., & Pellegrini, M. M. (2025). Guidelines for bibliometric-systematic literature reviews: 10 steps to combine analysis, synthesis and theory development. *International Journal of Management Reviews, 27*(1), 81–103. https://doi.org/10.1111/ijmr.12381

Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, T. C., Mulrow, C. D., Shamseer, L., Tetzlaff, J. M., Akl, E. A., Brennan, S. E., Chou, R., Glanville, J., Grimshaw, J. M., Hróbjartsson, A., Lalu, M. M., Li, T., Loder, E. W., Mayo-Wilson, E., McDonald, S., McGuinness, L. A., Stewart, L. A., Thomas, J., Tricco, A. C., Welch, V. A.,

Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah Vol 9 No 2, Juni 2026
E-ISSN : 2599-3410 | P-ISSN : 2614-3259
DOI : https://doi.org/ 10.36778/jesya.v9i2.2689

Whiting, P., & Moher, D. (2021). The PRISMA 2020 statement: An updated guideline for reporting systematic reviews. *BMJ, 372*, Article n71. https://doi.org/10.1136/bmj.n71

Pambudi, A., Juanda, B., & Priyarsono, D. S. (2014). Penentu keberhasilan redenominasi mata uang: Pendekatan historis dan eksperimental. *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, 17*(2).

Prabawani, B. (2017). Potential impacts of redenomination: A business perspective. *International Journal of Business and Society, 18*(S2), 295–308.

Prabawani, B. (2018). Money illusions: Post-redenomination shopping behavior. *Economics and Sociology, 11*(3), 166–177. https://doi.org/10.14254/2071-789X.2018/11-3/10

Prabawani, B., Musfirowati, I. H., & Riandhita, E. W. (2018). Socialization: An important factor of redenomination success in Indonesia. *Business and Economic Horizons, 14*(3), 700–712. https://doi.org/10.15208/beh.2018.49

Ramadhan, G. (2026, April 3). *Rupiah melemah tipis terhadap dolar AS pada 2 April 2026*. Readers.id.

Romer, P. M. (1986). Increasing returns and long-run growth. *Journal of Political Economy, 94*(5), 1002–1037.

Rusdi, F., & Widiastuti, T. (2020). Rancangan kebijakan harga di pasar: Telaah atas pemikiran Ibnu Khaldun dan Ibnu Taimiyyah. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan, 7*(9), 1755–1769.

Shafir, E., Diamond, P., & Tversky, A. (1997). Money illusion. *The Quarterly Journal of Economics, 112*(2), 341–374. https://doi.org/10.1162/003355397555208

Siddiqi, M. N. (2004). *Riba, bank interest and the rationale of its prohibition*. Islamic Research and Training Institute.

Simbolon, T. G. (2025, November 13). *PMK No. 70/2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2025–2029*. DataIndonesia.

Solow, R. M. (1956). A contribution to the theory of economic growth. *The Quarterly Journal of Economics, 70*(1), 65–94. https://doi.org/10.2307/1884513

Spangenberg, J. H., & Hail, S. (2024). Sustainability scientists' critique of neoclassical economics. *Global Sustainability, 7*, Article e33. https://doi.org/10.1017/sus.2024.29

Udo, O. O., & Agbai, E. P. (2023). The impact of currency redenomination on economic development. *Journal of Accounting and Financial Management, 9*(10), 114–132. https://doi.org/10.56201/jafm.v9.no10.2023.pg114.132

Uzlan, Haq, R. A., & Nurul, R. M. (2022). Comparative study of market mechanism in the view of Islamic economics and conventional economics. *IJED: International Journal of Economy Development Research, 1*(2), 34–45.

Van Eck, N. J., & Waltman, L. (2010). Software survey: VOSviewer, a computer program for bibliometric mapping. *Scientometrics, 84*(2), 523–538. https://doi.org/10.1007/s11192-009-0146-3

Zainuddin, Z., & Nuryadin, M. B. (2024). Konsep permintaan dan penawaran dalam ekonomi mikro Islam: Perspektif fiqh muamalah. *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis, 7*(2), 327–338. https://doi.org/10.31949/maro.v7i2.11812